



Strategi Pemberdayaan UMKM Pasca-Pandemi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad Rifqi Hidayatullah ^{1*}

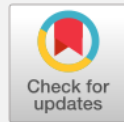
¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33171, Kepulauan Bangka Belitung-Indonesia

*Korespondensi: rifqi25hidayat@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 September 2024



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2024 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Hidayatullah, M. R. (2024). Strategi Pemberdayaan UMKM Pasca-Pandemi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Politics and Democracy*, 4(1), 15-26.

<https://doi.org/10.61183/polik>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional pascapandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengkaji tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan DKUKM telah membawa dampak positif berupa peningkatan kapasitas UMKM dan perbaikan ekonomi daerah, meskipun masih terkendala keberlanjutan program, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya akses pembiayaan. Analisis dengan kerangka teori pemberdayaan Jim Ife memperlihatkan bahwa strategi DKUKM mencakup dimensi struktural melalui penyusunan Renstra, dimensi ekonomi melalui penyediaan legalitas usaha dan akses pasar, serta pembangunan kapasitas komunitas melalui layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi lintas-sektoral dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

This study analyzes the empowerment strategies for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) implemented by the



rasi.v4i1.57

Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises (OCSME) of Bangka Belitung Province as part of the National Economic Recovery program in the post-COVID-19 period. Employing a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation, this research examines the stages of planning, implementation, and evaluation of empowerment programs while identifying supporting and inhibiting factors. The findings reveal that OCSME's empowerment strategies have had positive impacts in terms of enhancing MSME capacity and improving the regional economy, although challenges remain in program sustainability, low human resource quality, and limited access to financing. Analysis using Jim Ife's empowerment framework demonstrates that OCSME's strategies encompass structural dimensions through the formulation of strategic plans (Renstra), economic dimensions through the provision of business legality and market access, and community capacity building through the Integrated Business Service Center (PLUT). This study highlights the importance of cross-sectoral synergy and institutional capacity strengthening in creating a competitive, inclusive, and sustainable MSME ecosystem.

Keywords: Kebijakan Publik, Pemberdayaan, UMKM

1. Pendahuluan

Secara filosofis, keberadaan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan publik (public policy) dan upaya pemberdayaan (empowerment). Program pemberdayaan tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari (day to day administration), tetapi juga mencakup pelayanan publik yang luas serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks teori kebijakan publik, Anderson (1978) menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh aktor pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik. Sementara itu, menurut Ife dan Tesoriero (2014), pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai proses yang tidak hanya memberikan akses terhadap sumber daya, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengontrol kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan yang dijalankan pemerintah semestinya dirancang secara sistematis, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, agar benar-benar mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu mengentaskan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, atau setidaknya memfasilitasi mereka secara optimal agar memiliki kapasitas dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Kompleksitas persoalan yang beragam menuntut adanya strategi pemberdayaan yang adaptif, kontekstual, dan tepat guna sesuai kebutuhan lokal. Dalam hal ini, persoalan politik dan ekonomi menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan, karena

keduanya berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan pemberdayaan perlu dilakukan secara sistematis sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi agar benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu persoalan riil yang memperlihatkan urgensi pemberdayaan adalah kehadiran pandemi COVID-19. Pandemi tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut laporan Bank Dunia (2020), UMKM di negara berkembang mengalami pukulan berat akibat penurunan permintaan, gangguan rantai pasok, dan keterbatasan akses ke pembiayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho (2011), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi serta kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dengan demikian, pandemi menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana strategi pemberdayaan yang dijalankan pemerintah bersifat responsif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama lebih dari tiga tahun, berdampak serius terhadap kondisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh baik di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi, pendidikan serta sektor penting lainnya. Pada aspek ekonomi, pemerintah pusat dan daerah sepakat memprioritaskan pemulihan ekonomi dengan berbagai program strategis yang terarah dan terukur serta disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Implementasi berbagai program tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan UMKM yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) berusaha memulihkan sektor ekonomi melalui langkah tanggap dengan strategi pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Langkah cepat dan tepat pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi kerakyatan akibat dampak penyebaran COVID-19 yang sedang berlangsung yakni dengan menyediakan sarana permodalan melalui pinjaman usaha dengan bunga yang rendah, mempermudah perizinan, hingga penyediaan sarana pasar yang berbasis digital. Upaya ini menjadi bentuk intervensi kebijakan publik yang adaptif, mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional, sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap krisis.

Kebijakan tersebut mencerminkan strategi pemberdayaan yang menekankan pada peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi. Akses permodalan yang lebih mudah memungkinkan UMKM untuk menjaga kelangsungan produksi, sementara simplifikasi perizinan mempercepat legalitas usaha sehingga meningkatkan peluang penetrasi pasar. Di sisi lain, pengembangan pasar digital merupakan respons penting terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat selama pandemi, di mana transaksi daring meningkat pesat. Menurut Ife dan Tesoriero (2014), pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diiringi dengan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan struktural, baik di tingkat sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dengan demikian, strategi DKUKM tidak hanya berorientasi pada

pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan ketahanan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara lebih lanjut mengakomodasi adanya pengakuan dan upaya untuk memberdayakan UMKM. Hal ini menyebabkan perkembangan usaha kecil sangat pesat di masyarakat, seiring kemajuan teknologi dan permintaan pasar yang besar pada jenis-jenis barang tertentu. UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Kementerian Koperasi dan UKM sejak 17-26 maret 2020 menerima sedikitnya 1.131 pengaduan UMKM. Mayoritas para pelaku usaha tersebut mengeluhkan turunnya tingkat penjualan dibandingkan sebelum pandemi, yaitu sebanyak 68 persen dari total laporan yang diterima. Sedangkan keluhan lainnya adalah terkait dengan kendala permodalan (12 persen), kendala distribusi (10 persen), kendala bahan baku (6 persen), dan sisanya kendala produksi (4 persen). Begitupun halnya di Kabupaten Bangka, pandemi memberikan dampak yang cukup serius bagi para pelaku UMKM. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bangka meluncurkan berbagai rangkaian program guna memberikan solusi yang aktif-partisipatif bagi perkembangan UMKM.

Merespons kondisi tersebut, DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tiga kebijakan besar dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, yaitu pengembangan pembangunan agropolitan, pengembangan pariwisata, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, DKUKM merumuskan lima program prioritas yang saling terkait. Program-program tersebut mencakup peningkatan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, serta pemberdayaan usaha kecil. Selain itu, DKUKM juga menitikberatkan pada peningkatan pelayanan teknis melalui pelatihan perkoperasian dan UMKM, serta memperkuat peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM sebagai pusat pendampingan dan konsultasi. Keseluruhan program ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif dan berdaya saing, khususnya dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Meskipun DKUKM telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan, masih terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah program tidak dapat dijalankan secara optimal, sementara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas berimplikasi pada belum maksimalnya implementasi pemberdayaan berbasis digital. Selain itu, kesulitan menjangkau UMKM di wilayah pelosok serta keterbatasan tenaga pendamping menjadi hambatan struktural yang memperlambat pemerataan manfaat program. Hambatan ini diperparah oleh minimnya pengetahuan teknis dan referensi yang dimiliki pelaku UMKM dalam memproduksi produk yang kompetitif. Sebagaimana ditegaskan oleh Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kapasitas institusi pelaksana serta konteks sosial-ekonomi yang memengaruhi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi DKUKM bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga kelembagaan dan struktural.

Selain itu, permasalahan mindset dan mentalitas bersaing para pelaku UMKM juga menjadi isu penting. Rendahnya orientasi inovasi dan daya saing mengakibatkan UMKM kesulitan untuk berkembang di tingkat lokal, apalagi bersaing pada pasar nasional maupun global. Ife dan Tesoriero (2014) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menyentuh aspek

kesadaran kritis dan perubahan perilaku agar masyarakat tidak sekadar diberikan akses sumber daya, tetapi juga mampu mengelola dan mempertahankannya secara berkelanjutan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan utama: bagaimana strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan kultural? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk program pemberdayaan yang telah dijalankan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali secara mendalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM oleh DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Pendekatan ini relevan karena menekankan pemahaman makna dan konteks dari fenomena sosial sebagaimana terjadi di lapangan. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena secara holistik dengan menekankan makna daripada generalisasi, sedangkan Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk menjadi instrumen utama dalam proses eksplorasi data. Lokasi penelitian dipusatkan di DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sektor UMKM di berbagai kabupaten/kota. Informan penelitian terdiri atas pejabat DKUKM dan pelaku UMKM yang dipilih secara purposif karena dianggap paling relevan dengan fokus penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui kombinasi sumber primer dan sekunder dengan tiga teknik pengumpulan utama, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali pengalaman dan pandangan informan terkait program pemberdayaan UMKM. Observasi dilaksanakan secara langsung di lapangan guna menangkap dinamika implementasi program dan mengonfirmasi data hasil wawancara. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui arsip, laporan, dan catatan resmi yang dapat memperkuat temuan penelitian. Menurut Yin (2011), penggunaan berbagai teknik ini memungkinkan adanya triangulasi data sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan interaktif yang berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilah informasi sesuai fokus penelitian, sedangkan penyajian data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memperlihatkan pola hubungan yang ditemukan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan diarahkan pada upaya menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana strategi pemberdayaan UMKM dilaksanakan oleh DKUKM, faktor apa saja yang mendukung, serta hambatan yang menghalangi keberhasilan program. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami proses pemberdayaan UMKM di Bangka Belitung secara komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Program Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM dibutuhkan mengingat perannya yang vital bagi perekonomian. UMKM menghadapi tekanan signifikan akibat penurunan permintaan dan

gangguan rantai pasok global. Melalui pemberdayaan yang dirancang sebagai program jangka panjang, pemerintah berupaya membuka peluang baru terutama pada akses pendanaan, pelatihan keterampilan, dan pemasaran berbasis digital yang memungkinkan pelaku UMKM bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan ekonomi yang berat. Selain itu, program ini juga berperan penting dalam mempertahankan lapangan kerja lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat mikro. Dengan dukungan yang tepat, baik dari sisi keuangan maupun keterampilan, pelaku UMKM dapat tetap menjadi agen perubahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Urgensi program pemberdayaan UMKM selama pandemi tidak hanya terletak pada pemulihan ekonomi jangka pendek, melainkan juga pada pembangunan fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari peran strategisnya dalam menyerap tenaga kerja dan mendistribusikan pendapatan masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyediakan lapangan kerja bagi mayoritas tenaga kerja Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 telah menurunkan daya saing UMKM karena keterbatasan modal, menurunnya permintaan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi. Menurut Tambunan (2019), tantangan utama UMKM di Indonesia bukan hanya keterbatasan akses permodalan, melainkan juga lemahnya kapasitas manajerial dan adopsi inovasi. Oleh karena itu, pemberdayaan harus diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan modal, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar.

Selain itu, pemberdayaan UMKM perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan pembangunan inklusif yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah. Sen dan Kliksberg (2007) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek pemberdayaan sosial agar kelompok marginal memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya. Dalam konteks ini, program pemberdayaan UMKM di Bangka Belitung dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek akibat pandemi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tahapan Program Pemberdayaan

Terdapat berbagai tahapan dalam program pemberdayaan UMKM yang dijalankan DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, DKUKM berupaya mengoptimalkan potensi yang ada melalui penyusunan program yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Kondisi pandemi COVID-19 mendorong perlunya pendekatan yang lebih adaptif, mengingat daya beli masyarakat menurun dan aktivitas ekonomi melemah. Oleh karena itu, DKUKM menitikberatkan pada pembangunan fondasi kebijakan yang dimulai sejak ranah perizinan hingga penguatan kelembagaan sebagai langkah awal dalam menghidupkan kembali geliat UMKM. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2003), yang menekankan bahwa perencanaan kebijakan harus dimulai dari identifikasi masalah yang tepat agar implementasi dapat berjalan efektif. Anderson (1978) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan publik. Dengan

demikian, tahapan perencanaan yang dilakukan DKUKM dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi kebijakan publik yang dirancang untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi UMKM, sekaligus memastikan kebijakan tersebut relevan dengan konteks sosial dan ekonomi daerah.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan program, yang sangat bergantung pada kualitas perencanaan. Implementasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan spesifik UMKM, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan pasar. DKUKM melakukan analisis mendalam terhadap kondisi UMKM lokal sehingga strategi yang dijalankan dapat tepat sasaran. Pelaksanaan program juga menekankan alokasi sumber daya yang memadai, penugasan peran yang jelas, serta mekanisme evaluasi berlapis. Grindle (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh interaksi antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya. Dalam konteks ini, DKUKM perlu memastikan bahwa struktur kelembagaan dan koordinasi antaraktor berjalan sinergis agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

Pandangan ini sejalan dengan Edwards III (1980), yang menyoroti empat faktor penting dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika keempat faktor ini berjalan harmonis, maka kebijakan yang dirancang dapat mencapai sasaran secara efektif. Selanjutnya, Sabatier dan Mazmanian (1980) menekankan pentingnya kejelasan tujuan, ketersediaan instrumen kebijakan, serta komitmen aktor pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, aspek koordinasi lintas-sektoral dan konsistensi regulasi menjadi kunci yang tidak kalah penting. Selain itu, Van Meter dan Van Horn (1975) menambahkan bahwa implementasi kebijakan harus dipahami sebagai proses yang kompleks dan dinamis, di mana keberhasilan sangat dipengaruhi oleh standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial-ekonomi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, DKUKM perlu memastikan bahwa struktur kelembagaan dan koordinasi antaraktor berjalan sinergis agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan telah mencapai sasaran, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi mencakup aspek kuantitatif seperti pertumbuhan usaha dan peningkatan omzet, serta aspek kualitatif seperti perubahan kapasitas manajerial dan keberlanjutan akses pasar. Ife dan Tesoriero (2014) menekankan pentingnya refleksi kritis dalam setiap program pemberdayaan agar hasilnya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan siklus kebijakan yang menentukan efektivitas pemberdayaan UMKM di Bangka Belitung.

Evaluasi terhadap program pemberdayaan UMKM mencakup beberapa aspek penting, mulai dari penilaian pencapaian tujuan dan target, pengukuran dampak, hingga efektivitas dan efisiensi program. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sejak awal, seperti peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar dan aktif dalam program, pertumbuhan omzet serta laba yang dicapai setelah menerima bantuan dan pelatihan, serta kemampuan pelaku UMKM mempertahankan kualitas produk dan layanan. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, yakni sejauh mana UMKM mampu memperluas akses pasar dan memanfaatkan jaringan yang diperoleh melalui program pemberdayaan.

Pengukuran dampak program menjadi komponen penting lainnya, karena tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat jaringan, dan memperluas akses ke pasar. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program benar-benar memberikan hasil yang diharapkan, tidak hanya dalam bentuk peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Seperti ditegaskan oleh Vedung (1997), evaluasi kebijakan berfungsi sebagai instrumen refleksi untuk menilai hasil, proses, maupun dampak kebijakan agar dapat memperbaiki perumusan dan pelaksanaan di masa mendatang. Dengan demikian, pengukuran dampak tidak terbatas pada output jangka pendek, melainkan juga melihat perubahan kapasitas dan daya saing UMKM dalam jangka panjang.

Selanjutnya, evaluasi efektivitas dan efisiensi program menilai seberapa jauh tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Efektivitas dilihat melalui indikator peningkatan penjualan, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, perbaikan kualitas produk dan layanan, serta kemampuan UMKM memperluas pasar. Sementara itu, efisiensi menekankan pada proporsionalitas antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Dunn (2003) menyebut bahwa evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas agar dapat menilai secara komprehensif sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan publik. Oleh sebab itu, analisis biaya-manfaat, perbandingan dengan program sejenis, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi pendekatan penting agar program pemberdayaan UMKM tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dijalankan secara hemat dan tepat guna.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pemberdayaan UMKM

Faktor pendukung dan penghambat memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas program pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari sisi pendukung, terdapat tiga aspek utama yang memberi kontribusi besar terhadap keberhasilan program. Pertama, keberadaan regulasi dan kebijakan yang tepat guna memberikan dasar hukum dan arah yang jelas bagi pelaksanaan program. Renstra yang disusun pemerintah daerah menjadi panduan strategis, sementara dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas kredit lunak dengan bunga rendah, serta dorongan kepada perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), turut memperkuat kapasitas UMKM. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga berperan besar. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjangkau hingga pelosok memungkinkan DKUKM mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Ketiga, adanya sinergitas para pemangku kepentingan, baik internal maupun lintas sektoral, semakin memperkuat implementasi program. Kolaborasi DKUKM dengan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan untuk penerbitan PIRT, Diskominfo untuk mendukung digitalisasi, hingga kerja sama dengan sektor perbankan dalam penyediaan modal, menjadi contoh nyata integrasi antaraktor yang mendukung pemberdayaan UMKM.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang mengurangi efektivitas program pemberdayaan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keberlanjutan program. Banyak kegiatan pemberdayaan yang berhenti pada tahap pelatihan tanpa diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, sehingga pengetahuan dan keterampilan baru sulit diaplikasikan secara konsisten oleh pelaku UMKM. Hambatan berikutnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pelaku UMKM di Bangka Belitung masih menghadapi keterbatasan dalam manajemen usaha, pemasaran, keuangan, maupun literasi digital. Hal ini membuat hasil

berbagai program pemberdayaan sering tidak optimal, sehingga investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan mendesak. Faktor terakhir yang turut memperlemah pemberdayaan adalah terbatasnya akses pembiayaan. Banyak UMKM kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan formal akibat persyaratan ketat dan keterbatasan agunan. Kondisi ini menghambat inovasi, pertumbuhan usaha, serta peluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan, tantangan dalam memperluas akses keuangan tetap menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi agar program pemberdayaan benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Strategi Pemberdayaan Jim Ife pada Program Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Jim Ife (2013) menekankan bahwa pemberdayaan harus dipahami sebagai proses yang bersifat holistik, partisipatif, dan berbasis komunitas. Ia membedakan strategi pemberdayaan ke dalam beberapa dimensi, yaitu pemberdayaan sosial, ekonomi, politik, kultural, dan ekologis. Dimensi-dimensi tersebut saling terkait untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap sumber daya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengontrol, mengelola, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Dengan kerangka ini, strategi pemberdayaan yang dijalankan DKUKM dapat dianalisis sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara penyediaan akses struktural dan penguatan kapasitas individu maupun kelembagaan.

Dalam konteks Bangka Belitung, DKUKM melaksanakan strategi pemberdayaan melalui tiga instrumen utama. Pertama, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penguatan UMKM dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pemberdayaan struktural dan politik. Melalui perencanaan kebijakan yang komprehensif, pemerintah daerah berusaha mengubah struktur dan institusi agar lebih inklusif dalam memberikan akses terhadap sumber daya. Hal ini sesuai dengan pandangan Ife bahwa perubahan sosial yang berkeadilan menuntut adanya redistribusi kekuasaan dan peluang pada level lokal agar masyarakat dapat mengakses hak-hak dasarnya secara setara.

Kedua, penyediaan fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Balai Latihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) mencerminkan strategi pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan memberikan identitas legal kepada UMKM, pemerintah membuka akses pelaku usaha terhadap permodalan, legalitas pasar, dan peluang global. NIB di sini tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yang menghubungkan UMKM dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan kerangka Ife yang menekankan pentingnya membangun kapasitas ekonomi berbasis komunitas agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor aktif dalam sistem ekonomi.

Ketiga, penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi bentuk nyata dari strategi pemberdayaan berbasis kapasitas (*capacity building*). Melalui layanan konsultasi kelembagaan, produksi, SDM, pembiayaan, jaringan kerja sama, pemasaran, hingga teknologi informasi, PLUT memperkuat *soft skills* dan kemandirian UMKM. Ife menekankan bahwa pemberdayaan sejati harus memperhatikan dimensi kultural dan sosial, di mana masyarakat diberi ruang untuk belajar, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan adanya PLUT, strategi DKUKM bukan hanya menyediakan

akses, tetapi juga membekali UMKM dengan kemampuan untuk bertahan dan berkembang di era digital.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan DKUKM dapat dibaca melalui kerangka Ife sebagai kombinasi antara perubahan struktural melalui Renstra, pemberdayaan ekonomi melalui legalisasi usaha dan akses pasar, serta pembangunan kapasitas komunitas melalui PLUT. Analisis ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, akses pembiayaan, dan keberlanjutan program, strategi yang dijalankan telah mengarah pada prinsip pemberdayaan yang komprehensif dan inklusif. DKUKM tidak hanya berfokus pada intervensi teknis, tetapi juga pada upaya sistematis untuk membangun fondasi kelembagaan dan kapasitas sosial-ekonomi UMKM, sebagaimana dianjurkan oleh kerangka teori pemberdayaan Jim Ife.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi pascapandemi sekaligus strategi pembangunan ekonomi daerah. Program ini dimanifestasikan secara hybrid melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, DKUKM menyusun kebijakan yang adaptif terhadap kondisi krisis, sementara pelaksanaan diarahkan untuk menjawab kebutuhan spesifik UMKM, seperti permodalan, pelatihan, dan pemasaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target, dampak, serta efektivitas dan efisiensi program, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang menyertainya. Faktor pendukung meliputi regulasi dan kebijakan yang tepat guna, dukungan sarana dan prasarana, serta sinergitas antar pemangku kepentingan yang memungkinkan kolaborasi lintas-sektoral. Sebaliknya, hambatan muncul dalam bentuk keberlanjutan program yang belum terjaga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya akses pembiayaan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan struktural, teknis, dan kultural yang perlu ditangani secara sistematis agar program dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Dalam kerangka teori pemberdayaan Jim Ife, strategi yang dijalankan DKUKM dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan pemberdayaan struktural, ekonomi, dan kapasitas komunitas. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merepresentasikan dimensi struktural dan politik yang bertujuan menciptakan akses setara terhadap sumber daya. Fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Balatkop UMKM memperkuat aspek ekonomi dan legalitas usaha, sementara penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menekankan pada capacity building melalui layanan konsultasi yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga digitalisasi. Strategi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penyediaan akses, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berdaya secara mandiri. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM di Bangka Belitung telah berjalan melalui pendekatan yang komprehensif, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan pada aspek keberlanjutan program, peningkatan kapasitas SDM, dan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Sementara itu, implikasi akademisnya terletak pada kontribusi penelitian ini dalam memperkuat pemahaman mengenai penerapan strategi pemberdayaan berbasis teori komunitas Jim Ife dalam konteks kebijakan publik daerah.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Anderson, J. (1978). *Public policy-making*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Bank Dunia. (2020). *The impact of COVID-19 on micro, small, and medium enterprises (MSMEs)*. World Bank Report.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi* (Edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sen, A., & Kliksberg, B. (2007). *First the people: A global movement for change*. New York: Oxford University Press.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Vedung, E. (1997). *Public policy and program evaluation*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. New York: The Guilford Press.